

**Politik Etis Kerajaan Soppeng 1905-1942**Irwansya Putra<sup>1</sup>, Patahuddin<sup>2</sup>, Bahri<sup>3</sup><sup>1</sup>Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM<sup>1</sup>irwansyaputraunm@gmail.com***Abstrak***

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang penerapan politik etis di Kerajaan Soppeng, bentuk penerapan dan dampak dari politik etis di Kerajaan Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik intern dan ektern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan terdiri dari wawancara dan mengumpulkan sumber arsip serta literatur-literatur yang berhubungan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya pengaruh Hindia Belanda di Kerajaan Soppeng pertama kali Pada tanggal 25 September 1905 dan menenpatkan diri sebagai penguasa di Kerajaan Soppeng. Semenjak berkuasa, Belanda Menerapkan kebijakan politik etis, dimana kebijakan ini meliputi pembangunan 14 sekolah dan dibangunnya 12 irigasi di Wilayah Kerajaan Soppeng. Wilayah ini menjadi perhatian pihak Belanda karena kondisi masyarakat yang terbelakang dalam bidang pengetahuan dan potensi pertanian dan pertanian yang subur di wilayah ini patut untuk dikembangkan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masuknya Belanda di Kerajaan Soppeng telah memeberikan dampak positif bagi kaum pribumi, hal ini dikarenakan masuknya Belanda telah mengajarkan konsep pendidikan formal serta tata cara mengelola pertanian dengan moderen seperti, membangun irigasi di Kerjaan Soppeng pada saat itu. Adapun dampak negatif ialah banyaknya kebiasaan lokal yang berubah.

***Kata Kunci : Politik, Etis, Kerajaan, dan Soppeng******Abstract***

This research is discuss about the background of the application of Ethical Politics in the Kingdom of Soppeng, the terms of application and the impact of ethical politics in the Soppeng Kingdom. This research is using historical research method which consists of four stages, which is heuristics (searching and gathering sources), source criticism (internal and external criticism), interpretation (source interpretation) and historiography (history writing). The method of data collection is done by conducting field research consisting of interviews and collecting archives and related literatures. Based on the results of this research shows that the entry of the influence of the Dutch East Indies in the Kingdom of Soppeng was the first time on September 25th, 1905 and established itself as a ruler in the Kingdom of Soppeng. Since coming to power, the Netherlands has implemented an ethical political policy, which includes the construction of 14 schools and the construction of 12 irrigation systems in the Soppeng Kingdom Area. This region is concern to the Dutch because the backward condition of the community in the field of knowledge and the potential for fertile land and agriculture in this region deserves to be developed. From the results of this study, it can be concluded that the entry of the Netherlands in the Kingdom of Soppeng had a positive impact on the natives, this is because the Dutch entry had taught the concept of formal education and

procedures for managing agriculture in a modern way, such as building irrigation in the Soppeng Work at that time. The negative impact is that many local habits have changed.

**Keyword :** *politics, ethical, kingdom, and Soppeng*

### A. Pendahuluan

Berkembangnya paham liberal di Belanda pada akhir abad 19 di Eropa mulai membawa dampak bagi Indonesia pada saat itu. Hal ini dikarenakan perkembangan liberalisme menyebabkan munculnya berbagai macam kritikan terhadap Kerajaan Belanda dengan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer, berjudul “*Hutang Kehormatan*” dalam Majalah *De Gids*. Didalamnya dikemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari pembendaharaan negara (Nasution S. 2011:15)

Oleh karena itu, sebagai dampak dari diterimanya usulan kaum liberal di Belanda maka pada tahun 1901 diterapkanlah 3 jenis kebijakan politik etis diantaranya: edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Semenjak diterapkannya politik etis di beberapa daerah yang ada di Nusantara pada masa Hindia Belanda, politik etis membawa dampak yang lebih baik kepada kaum-kaum bumiputera pada saat itu. Hal tersebut dapat diketahui dari meningkatnya hasil pertanian kaum-kaum bumiputera dibandingkan dengan masa *kulturstelsel*. Meningkatnya hasil pertanian kaum bumiputera, akan tetapi jikalau dibandingkan dengan hasil-hasil pertanian atau perkebunan milik Belanda, karena dari segi kualitas maupun jumlah pihak Belanda masih mendominasi.

Munculnya politik etis di Nusantara pada saat itu dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi kaum peribumi terkait dengan sistem pertanian yang baik. Setelah diterapkannya Kebijakan politik etis secara menyeluruh di Nusantara, maka secara otomatis kerajaan-kerajaan yang berada dibawah kekuasaan atau

pemerintahan Belanda ikut terkena dampak kebijakan politik etis.

Pada tahun 1905 pemerintahan Hindia Belanda menargetkan penguasaan secara penuh penguasaan di Sulawesi Selatan, Hal ini disebabkan karena pergejolakan di darat maupun di laut pada daerah tersebut. Pergolakan terjadi tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan.

Realisasi dari perintah Gubernur Jenderal tersebut maka dikirimlah pasukan ekspidisi militer ke Sulawesi Selatan untuk menaklukan kerajaan-kerajaan yang masih berdaulat. Pada tanggal 25 September 1905, Kolonel C.A Van Leonen sebagai Panglima Belanda dan Ekspedisi Sulawesi Selatan (*bevelhebber der Expeditie naar Zuid Celebes*) tiba di Watansoppeng (Nonci. 2003:305). Kendali Belanda di Kerajaan Soppeng secara tidak langsung terkena dampak dari penerapan politik etis itu sendiri.

### B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai politik etis pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Kerajaan Soppeng, penulis menggunakan jenis penelitian sejarah dengan menerapkan metode sejarah dalam penelitian dan penulisannya. Dalam penelitian sejarah ada empat langkah atau tahapan dalam penelitian sejarah. Tahapan itu terdiri atas tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Madjid, dkk. 2013)

### C. Tinjauan Penelitian

Karya Ilmiah sebelumnya telah ada mengkaji mengenai kedatangan Belanda di Sulawesi Selatan dalam bentuk buku yang berjudul “Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan”. Buku ini membahas bagaimana

kedatangan Belanda ke Sulawesi Selatan serta bentuk-bentuk perlawanan yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi selatan pada masa imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Selatan.

Karya Ilmiah lain dalam bentuk tesis tahun 2018 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Makassar yang ditulis oleh Rahmatullah dengan judul *Watang Lipu La Palloge Dalam Menentang Imperialisme Belanda di Kerajaan Soppeng (1905-1906)*. Dalam karya ini membahas mengenai perlawanan Watang Lipu Lapallogge dalam menentang kedatangan Belanda di Kerajaan Soppeng serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari perlawanan tersebut.

#### D. Pembahasan

##### 1. Latar Belakang Penerapan Politik Etis, Bentuk dan Dampaknya di Kerajaan Soppeng

Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Belanda giat melakukan perluasan wilayah-wilayah di luar dari Pulau Jawa yang tidak lain tujuan untuk melancarkan serta memuluskan usaha-usaha Belanda di Nusantara, serta menambah potensi penguasaan lahan yang produktif untuk pertanian, serta meminimalisir potensi masuknya pengaruh-pengaruh asing. Maka dari itu pemerintahan Belanda memerangi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang masih merdeka dan tidak mau tunduk pada pemerintahan Belanda. Perang perluasan kekuasaan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Jendral JB. Van Heutsz (1904-1909). Raja-raja yang berhasil dikalahkan, dipaksa menandatangani perjanjian takluk yang terkenal dengan nama *korte verklaring* atau perjanjian pendek

Dalam perkembangan selanjutnya, ditahun 1905 Pemerintah Kolonial Belanda melakukan ekspedisi ke Sulawesi Selatan yang tercatat pada tanggal 25 September

1905, Kolonel C.A Van Leonen sebagai Panglima Belanda dan Ekspedisi Sulawesi Selatan (*bevelhebber der Expeditie naar Zuid Celebe*) tiba di Watansoppeng dan pada hari itu juga langsung mengadakan rapat dengan Datu Soppeng Sitti Zainab bersama beberapa pembesar raja-raja bawahannya. yang kemudian dari rapat tersebut melahirkan sebuah kesepakatan ada pun Isi dari perjanjian pendek yang disepakati raja Soppeng ialah :

- a. Pemerintah Kerajaan Soppeng harus membayar upeti perang sejumlah f. 75.00,- kepada gubernur Hindia Belanda
- b. Rencana-rencana Gubernumen Hindia Belanda mengenai pemungutan-pemungutan pajak pembuatan jalan raya, penghapusan perbudakan dan sebagainya, larangan pemakain senjata tajam di tempat umum dan pengumpulan senjata api.(Inventaris Arsip Soppeng tingkat II: iii)

Dari hal tersebut secara langsung telah mengokohkan sebagai penguasa tunggal dan secara tidak langsung kebijakan politik etis juga ikut diterapkan di Kerajaan Soppeng itu sendiri. Pada masa Pemerintahan Belanda telah menerapkan berbagai macam kebijakan mulai dari sistem pemerintahan sampai kehidupan bersosial di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kebijakan Pemerintah Belanda yaitu Pendidikan, dimana didalam penerapan kebijakan tersebut telah memberikan peranan yang penting dalam perkembangann pendidikan di Kerajaan Soppeng pada saat itu. Pendidikan yang mulanya hanya pendidikan non-formal akan tetapi setelah Belanda memerintah maka mulailah diperkenalkan model pendidikan formal.

Perkembangan pendidikan di Kerajaan Soppeng dapat dilihat dari jumlah sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah seperti sekolah kelas II yang terdapat di Watangsoppeng dan di Takalala, Cabeng'E, Batu-batu dan Cangadi, kemudian dalam

waktu 2 tahun selanjutnya didirikan 14 buah sekolah yang tersebar di wilayah Kerajaan Soppeng (Badan Arsip. 2004:28. Semenjak berkembangnya pendidikan setelah diterapkan pendidikan formal, maka hal ini telah membuka peluang anak-anak kaum pribumi khususnya anak-anak bangsawan untuk mengenyam pendidikan. Seperti yang terjadi pada Andi Wana memiliki seorang putri yang bernama I Dio yang dinikahkan pada tahun 1924 dengan Muhammad Tahir. Anak laki-laki dari Baso Billa Datu Citta yang masih di ketahui kedua-duanya masih sebagai pelajar di sekolah OSVIA dan masih mendapatkan pelajaran disekolah tersebut (Badan Arsip Daerah No Reg.330).

Kerajaan Soppeng pada masa pemerintahan Belanda, memiliki perhatian tersendiri dimata Belanda, terkhusus pada wilayah pertanian yang terkait dengan dampak politik ertis itu sendiri. Mengenai pengairan/irigasi yang sebelumnya dimana kondisi pertanian di Kerajaan Soppeng masih mengikut dengan kondisi iklim dan cuaca, seperti ketika pada musim penghujan petani menanami lahanya dengan komoditi padi, akan tetapi ketika musim kemarau petani akan menami lahannya dengan komoditi jagung atau kacang-kacangan. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah Hindia Belanda sehingga mengeluarkan kebijakan untuk membangun irigasi. Tercatat pada masa pemerintahan Hindia Belanda irigasi yang dibangun sebagai berikut:

- 1) Pembagunan irigasi di Mario ri Awa
- 2) Pembangunan irigasi di Leworeng
- 3) Perbaikan pengairan air Salo Wawo dan Salo Soppeng
- 4) Pengairan air dari Salo Pajalesang
- 5) Pengairan air dari Salo Cengadi (untuk tanah di Cengadi)
- 6) Pengairan dari Salo Mutiara( Mario ri Wawo)
- 7) Pengairan air dari Salo Langkame ( Mario ri Wawo)

- 8) Pengairan air dari Salo Lalabata ri Lau untuk daerah Takalala
- 9) Pengairan air dari Salo Sero
- 10) Pengairan dari Salo Lamongo (Patojo)
- 11) Pengairan air dari Salo sebagian ke daerah Baringen
- 12) Pengairan air dari Welenae. Mungkin akan terjadi dalam waktu 10 tahun terakhir.

Semenjak penerapan irigasi di Kerajaan Soppeng telah membawa dampak positif bagi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, hal ini dikarenakan hasil pertanian panen perkebunan dan pertanian meningkat sebelum adanya pembangunan irigasi tersebut. Setelah Pemerintah Hindia Belanda menetapkan dirinya sebagai penguasa tunggal, maka pemerintah membagi beberapa wilayah yang ada di Kerajaan Soppeng kedalam bentuk-bentuk distrik, yang dimana distrik-distrik ini dikontrol oleh Kontrolir yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kontrolir sendiri merupakan pejabat pelaksana pemerintah Belanda yang langsung berhubungan dengan pemerintahan bumiputera dan mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan pemerintahan diwilayah tersebut. Seorang Kontrolir biasanya membawahi beberapa kepala-kepala distrik. Pemilihan kepala distrik diemban kepada dewan hadat dari daerah adat. Dewan adat dalam melakukan pemilihan, tentunya berkaitan dengan kebiasaan setempat. Persyaratan calon ditentukan oleh derajat kebangsawanan, wibawa, pengaruh, dan pendukung. Karena persetujuan pengkatan merupakan wewenang pemerintah Hindia Belanda, sehingga ditambahkan persyaratan bersedia bekerjasama dan menjadi bawahan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pengaruh Belanda semenjak masuknya di Kerajaan Soppeng juga membawa pengaruh terhadap kebudayaan ditengah-tengah masyarakat seperti pelarang membawwa badik di tempat umum, pengaruh terhadap

betuk rumah dan terjadinya akulturasi budaya dari luar.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Politik etis muncul sebagai bentuk kebijakan baru yang mengkritik sistem tanam paksa yang dipandang menyengsarakan pribumi di negeri jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda.. Pencetus politik etis yang paling dikenal ialah Van de Venter dengan konsepnya mengembangkan tiga hal ya itu, Irigasi, transmigrasi dan Edukasi. Dalam surat Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Alexander Kroesen tertanggal 14 Juli 1905 memerintahkan penaklukan ke Sulawesi Selatan. Pada tanggal Pada tanggal 25 September 1905, Kolonel C.A Van Leonen sebagai Panglima Belanda dan Ekspedisi Sulawesi Selatan ( *bevelhebber der Expeditie naar Zuid Celebes* ) tiba di Watansoppeng dan ditanda tanganinya perjanjian pendek oleh Datu Soppeng zitti Sainabe.
2. Setelah ditanda tanganinya perjanjian pendek oleh penguasa kerajaan Soppeng menetapkan Pemerintah Belanda sebagai penngusa tunggal di Kerajaan tersebut dan posisi pemerintahan lokal hanya sebatas pelaksana tugas dari Pemerintah Belanda semata. Munculnya sebagai penguasa baru di Kerajaan Soppeng memunculkan berbagai kebijakan-kebijkan di wilah tersebut. Tujuan Pemerintah Belanda menaklukkan Kerajaan Soppeng merupakan bentuk politik untuk memeperkokoh kekuasaan di wilayah-wilayah Nusantara pada saat itu agar tidak mendapat pengaruh dari luar atau asing. Tujuan lain masuknya Belanda ialah untuk menjajah dan mengambil hasil-hasil kekayaan alam di Kerjaan Soppeng.

3. Pemerintah Belanda semejak berkuasa menerapkan berbagai kebijakan baik pada pengembangan pendidikan yang tujuannya untuk mendapatkan golongan-golong terpelajar yang nantinya akan bekerja kepada Belanda. Perkembangan pendidikan pada masa Belanda terdapat 14 buah sekolah rakyat yang didirikan. Pengembangan selanjutnya yaitu pada wilayah pertanian dengan membangun Irigasi untuk mengairi lahan-lahan pertanian di Kerajaan Soppeng, tercatat 12 pembangun irigasi di Kerajaan Soppeng. Masuknya pengaruh Belanda di Kerjaan Soppeng telah membawa dampak yang besar terhadap kehidupan Sosial masyarakat yang mulai merubahan tatanan kepemimpinan sampai kehidupan sosial masyarakat dengan mengenalkan pendidikan formal, dampak selanjutnya yaitu berkembangnya perekonomian khususnya pada wilayah pertanian karena telah dibangunnya irigasi untuk mengairi persawahan dan dampak terkhir ialah pada kebudayaan yang banyak berubah seperti kebiasaan-kebiasan lama mulai ditinggalkan dan mulai banyak masuk budaya-budaya dari luar yang tidak dikenal oleh masyarakat Sebelumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Madjid, M. S. (dkk. 2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: UNM press.
- Sjamsuddin, H. (2007 : 85). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soetrisno, L. (1998). *Pertanian pada Abad ke 21*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kontrak Kerjasama (1992).
- Asse, A. (2018, Maret 8). Wawancara dengan Bapak Ambo Asse, di Kantor UPTD Bendung Awo.

- Irwan, A. (2018, Maret 8). Wawancara dengan Bapak Andi Irwan di Kantor UPTD Bendung Awo.
- Laodding. (2018, Maret 10). Wawancara dengan Bapak Laodding di kediamannya (Lompoloang).
- Nawas, A. (2018, Maret 16). Wawancara dengan Bapak Abu Nawas di Kantor UPTD Bendung Awo.
- Pusposutrdjo, S. (2001). *Pengembangan Irigasi, Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Robert , J. K. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Saharuddin. (2018, Maret 8). Wawancara dengan Bapak Saharuddin di Kantor UPTD Bendung Awo.
- Supratman. (2018, April 14). Wawancara dengan Bapak Supratman via telepon.